KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Wanti-wanti Potensi Stagnasi
Tanggal : Minggu, 12 November 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

DPR Wanti-wanti Potensi Stagnasi

PARLEMEN mewanti-wanti Pemerintah untuk mewaspadai potensi perlambatan ekonomi kuartal IV-2023.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan dalam laporannya, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 4,94 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2023.

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menyebut, angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun pada lalu 5,73 persen dan dibandingkan kuartal sebelumnya 5,17 persen (*year on year*/yoy).

"Realisasi pertumbuhan ekonomi ini mengakhiri tren pertumbuhan di atas lima persen selama tujuh kuartal terakhir. Artinya Indonesia mulai memasuki periode perlambatan ekonomi yang cukup dalam," kata Anis.

Ketua DPP PKS ini juga mengungkapkan, setelah menikmati masa bukan madu, *wind fall* sejumlah komoditas unggulan nasional dalam beberapa waktu terakhir, harga komoditas utama Indonesia tersebut mulai mengalami penurunan harga secara perlahan, di antaranya seperti minyak sawit, batubara dan nikel.

"Pelemahan ini bisa berdampak besar mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, ekspor, hingga kemampuan daya beli masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh, Anis menyampaikan, pelemahan harga komoditas utama Indonesia, memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi perdagangan internasional Indonesia.

Dalam laporan BPS tersebut, tercatat kinerja ekspor yang memiliki distribusi sebesar 21,6 persen turun 4,26 persen. Dan impor yang memiliki distribusi negatif 19,57 persen turun 6,18 persen.

"Terkoreksinya sumber pertumbuhan net ekspor selaras dengan kinerja perdagangan nasional yang melemah. Indonesia kembali memasuki jalur lambat pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Anis menambahkan, melambatnya pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2023 menjadi sinyal tanda bahaya bahwa Indonesia masuk dalam perlambatan ekonomi.

"Kita belum bisa lepas dari stagnasi pertumbuhan ekonomi dalam kisaran lima persen, sekarang turun menjadi 4,94 persen," jelasnya.

Upaya Indonesia, imbuh Anis, untuk bisa keluar dari stagnasi pertumbuhan 5 persen belum cukup kuat. Kondisi ini tentu akan menjadikan langkah Indonesia untuk mengakhiri tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, sebagaimana target dalam APBN 2023, akan menjadi langkah yang sangat sulit.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengkhawatirkan melambatnya pertumbuhan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di sisa akhir tahun ini. Hal tersebut bertahan dalam jangka waktu yang lama dan menjadi beban bagi perekonomian nasional.

"Intinya, kekuatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi sedang melemah. Mudah-mudahan penurunan ini bersifat temporer dan biasa, bukan bersifat struktural. Jangan sampai kita terperangkap pertumbuhan ekonomi rendah secara permanen atau *lower for longer*," kata Hendrawan.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mendorong Pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi agar bisa menyerap tenaga kerja, karena angka pengangguran di Indonesia terbilang masih tinggi.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dari total 147,71 angkatan kerja.

Sedangkan untuk provinsi tertinggi angka pengangguran ditempati oleh Banten sebesar 7,52 persen. Lalu diskuti oleh Jawa Barat di angka 7,44 persen, Kepulauan Riau 6,80 persen, Jakarta 6,53 persen dan Maluku 6,31 persen.

Berkaca dari hal tersebut, Puan mendorong Pemerintah melakukan intervensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Pemerintah diingatkan untuk mengambil langkah-langkah strategis, seperti mengundang investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja, baik domestik maupun asing.

"Investasi merupakan motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menarik investasi, kita dapat membuka peluang kerja baru dan meningkatkan produktivitas ekonomi," ucapnya.

Puan juga mendorong Pemerintah agar mengarahkan fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi seperti industri manufaktur, pertanian, teknologi dan pariwisata.

"Hal ini dapat menciptakan diversifikasi ekonomi yang kuat, yang lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi global," tegas Puan.

Lebih lanjut, dukungan dari Pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan kewirausahaan dinilai perlu juga diutamakan. Sebab, menurut Puan, UMKM adalah sumber potensial lapangan kerja yang signifikan. ■ DIR